

PROFIL
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
PERANGKAT DAERAH



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SURABAYA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Perangkat Daerah Responsif Gender sesuai dengan komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di lingkungan Perangkat Daerah untuk mendukung terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender serta mewujudkan Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya.

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Perangkat Daerah kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya,
Plt. Kepala Dinas

Muhammad Fikser AP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model Desa/Perangkat Daerah Ramah Perempuan dan peduli Anak;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6

- Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya;
 8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA;
 9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023;
 10. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya;
 11. Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/ 4 /436.1.2/2024 Tentang Penetapan Model Daerah Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya Tahun 2024 Surabaya.

1.3 Tujuan Penyusunan Profil PUG

Penyusunan Profil Pengarusutamaan Gender Perangkat Daerah memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya Perangkat Daerah Responsif Gender yang mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak dari KemenPPPA serta memahami strategi percepatan PUG (Pengarusutamaan Gender) melalui revitalisasi 3 komponen PUG (Pelembagaan, Penyelenggaraan dan Inovasi);
2. Mewujudkan Perangkat Daerah Responsif Gender sebagai model yang baik (*good practices*) dalam mewujudkan Keadilan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) untuk mendukung Kota

Surabaya sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi;

3. Melaksanakan evaluasi strategi percepatan PUG di Perangkat Daerah apakah sudah sesuai 3 komponen PUG tahun 2025;
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2025.

BAB II

PROFIL PERANGKAT DAERAH DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah berdasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dinas Komunikasi dan Informatika mengampu urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Visi Pemerintah Kota Surabaya adalah Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan.

b. Misi

Misi Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
2. Membangun sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.

- 4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dalam pelaksanaan Misi Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Komunikasi dan Informatika menunjang Misi Ke-4.

2.3 Demografi

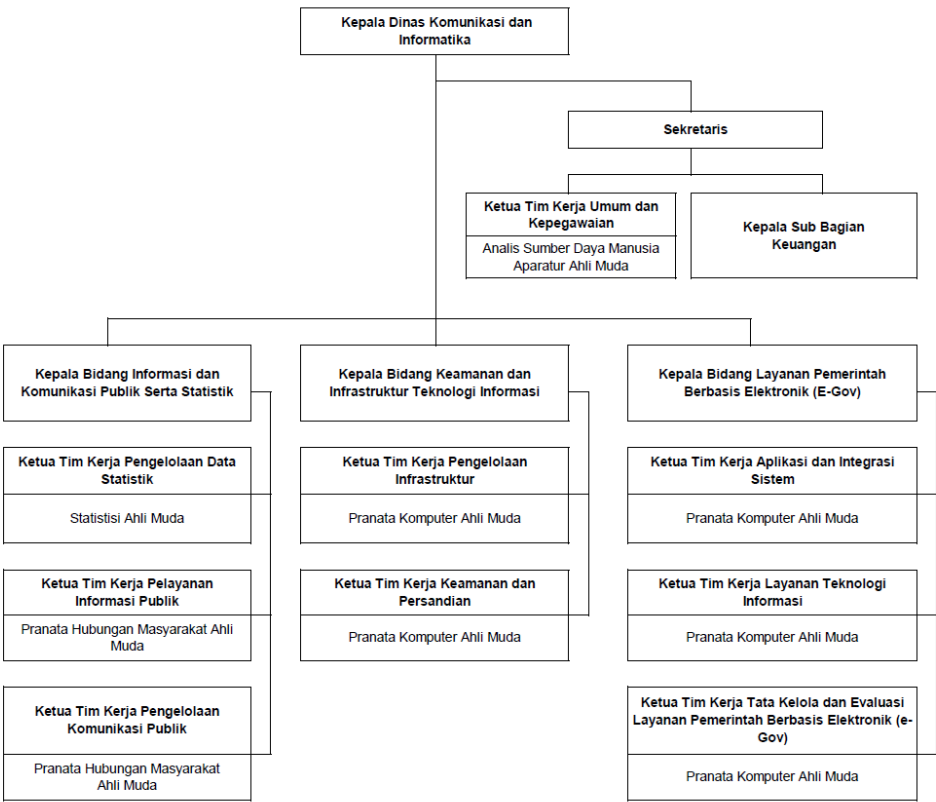
Dinas Komunikasi dan Informatika berkantor di Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Jl. Jimerto No. 25-27 lantai 5, Ketabang, Genteng, Surabaya, Jawa Timur, dengan kontak telepon (031) 5312144 pesawat 384 / 241, pos-el dinkominfo@surabaya.go.id, dan laman surabaya.go.id.

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi:

- 1. Sekretariat
- 2. Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi
- 3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik
- 4. Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Gov)

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika selengkapnya sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Dinas Komunikasi dan Informatika tertuang pada:

- a. Keputusan Walikota Nomor : 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya;
- b. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor: 400.2/491/436.7.13/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2024.

2.4.2 Sosialisasi PUG

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, dibutuhkan sosialisasi PUG kepada pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025 dengan pokok bahasan antara lain:

- Sosialisasi PUG, kebijakan PUG, dan Focal Point;
- Pendampingan dan reviu penyusunan dokumen perencanaan penganggaran Responsif Gender.

Data pendukung sebagaimana link berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1xEkNJ8_LC473dx3MbavPH_B5-hCmFp8?usp=sharing

2.4.3 SDM Terlatih PUG

A. SDM terlatih PUG di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut

1. SDM Perencanaan dan Penganggaran Terlatih PUG

Jumlah SDM Terlatih PUG	Jumlah SDM Seluruhnya	Persentase
5	200	2,5%

2. SDM Teknis

Jumlah SDM Terlatih PUG	Jumlah SDM Seluruhnya	Persentase
12	200	6%

3. SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG

Jumlah SDM Terlatih PUG	Jumlah SDM Seluruhnya	Persentase
4	200	2%

B. Focal Point PUG

Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika nomor 400.2/491/436.7.13/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2024, berikut adalah susunan Tim Focal Point PUG Dinas Komunikasi dan Informatika.

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Pembina
2	Sekretaris	Ketua
3	Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Anggota
5	Kepala Bidang Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Gov)	Anggota
6	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Keamanan dan Persandian	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Aplikasi dan Integrasi Sistem	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Layanan Teknologi Informasi	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Evaluasi Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik (E-Gov)	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Statistik	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pelayanan Informasi Publik	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik	Anggota

2.4.4 Data Terpilah

1. Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	JENIS KETENAGAAN	JABATAN			USIA	TINGKAT	DIFABEL	NON DIFABEL	PENDAPATAN		TUNJANGAN / TPP		NON ASN		ASN		JUMLAH TOTAL	
		STRUKTURAL	FUNGSIONAL	LAINNYA		PENDIDIKAN			UMR	NON UMR	YA	TIDAK	L	P	L	P	L	P
1	KEPALA DINAS	ESELON II			50	MAGISTER	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
2	SEKRETARIS	ESELON III			57	MAGISTER	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
3	KEPALA BIDANG	ESELON III			41-49	SARJANA - MAGISTER	0	2	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0
4	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	ESELON IV			37	SARJANA	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
5	KETUA TIM KERJA		V		37-51	SARJANA - MAGISTER	0	8	8	0	8	0	0	0	4	4	4	4
6	STAF SEKRETARIAT			V / OS	23-57	SMA-SARJANA	1	23	23	0	6	17	11	6	2	4	13	10
7	STAF BIDANG LAYANAN PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-GOV)			V / OS	24-56	SMA-MAGISTER	0	60	60	0	19	41	29	12	11	8	40	20
8	STAF BIDANG KEAMANAN DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI			V / OS	23-50	SMA-SARJANA	0	68	68	0	11	57	49	8	9	2	58	10
9	STAF BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SERTA STATISTIK			V / OS	25-46	SMA-MAGISTER	0	37	37	0	9	28	18	10	5	4	23	14
	JUMLAH						1	201	201	0	58	143	107	36	36	22	143	58

2. Data Kegiatan Responsif Gender Sesuai PPRG

No.	KEGIATAN SESUAI RKA/APBD	JUMLAH DANA APBD	KEGIATAN SWADAYA/ DAK/ APBN/ SUMBER DANA LAINYA	JUMLAH DANA	SASARAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT KEGIATAN		
						L	P	TOTAL
1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp12.212.554.307	0	Rp12.212.554.307	Masyarakat (Follower Media Sosial Sapa Warga Surabaya dan Bangga Surabaya)	556.455	398.075	954.530
2	Pelayanan Informasi Publik	Rp1.180.247.014	0	Rp1.180.247.014	Masyarakat yang melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kota Surabaya	8.202	3.340	11.542
3	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp1.700.071.798	0	Rp1.700.071.798	Anggota Komunitas Informasi Masyarakat	858	531	1.389
4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp57.058.841.214	0	Rp57.058.841.214	Pegawai Dinas Komunikasi dan informatika pada Tim Kerja Pengelolaan Infrastruktur	45	7	52
5	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.373.110.034	0	Rp2.373.110.034	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tim Kerja Keamanan dan Persandian	13	5	18
6	Penyediaan Layanan Keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.809.529.676	0	Rp3.809.529.676	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tim Kerja Keamanan dan Persandian	13	5	18
7	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Rp2.459.129.418	0	Rp2.459.129.418	Masyarakat peserta Broadband Learning Center	15.101	11.716	26.817
8	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	Rp851.773.959	0	Rp851.773.959	Jumlah pegawai yang menangani Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah	12	7	19
9	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Rp5.093.782.846	0	Rp5.093.782.846	Jumlah pegawai pelaksana sub kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	2	2	4

10	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Rp344.878.712	0	Rp344.878.712	Jumlah pegawai pelaksana sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	0	2	2
11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp421.848.609	0	Rp421.848.609	Jumlah pegawai pelaksana sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	2	1	3

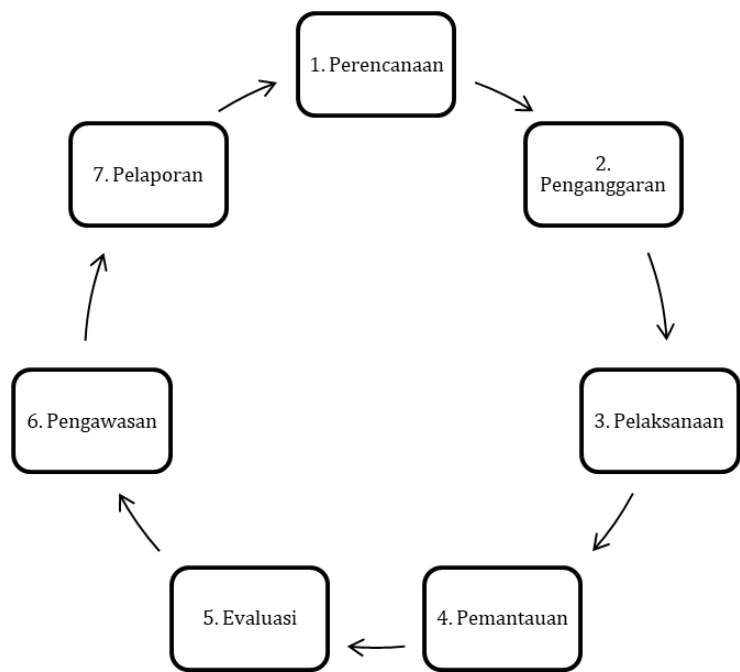
3. Data Kinerja Responsif Gender Sesuai PPRG

No.	PROGRAM	SASARAN	TARGET		CAPAIAN		PENERIMA MANFAAT		JUMLAH	KETERANGAN
			absolut	%	absolut	%	L	P		
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	87%	100%	99,97%	114,91%	8.202	3.340	11.542	Masyarakat yang melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kota Surabaya
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani	100%	100%	100%	100%	15.101	11.716	26.817	Masyarakat peserta Broadband Learning Center
3	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	27%	100%	27,59%	102.19%	13	5	18	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tim Kerja Keamanan dan Persandian
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	2	1	3	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tim Kerja Pengelolaan Data Statistik
	JUMLAH						23.318	15.062	38.380	

BAB III
PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI
PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:

Gambar 3.1. Proses Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG):

1. Perencanaan yang Responsif Gender

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

- a) Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Perencanaan PUG
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor: 400.2/491/436.7.13/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2024.

- b) Renstra dan Renja Perangkat Daerah Responsif Gender
Sebagai bentuk keberlanjutan dari Renstra sebelumnya yang terdapat Tujuan, Sasaran, Program terkait peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 yang diwujudkan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Isu-isu gender dalam isu-isu strategis dinas :

- 1) peningkatan kemampuan TIK perangkat pemerintahan dan masyarakat;
- 2) diseminasi informasi;
- 3) penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) penyediaan infrastruktur TIK;
- 5) keamanan informasi.

Link dokumen Renstra dan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1PPUbPZus3o1I3Pyt7jA_zW2XjTWAgKod?usp=sharing.

- c) Dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (GAP dan GAB)
Terdapat 11 Sub Kegiatan yang memberi manfaat adil bagi laki-laki dan perempuan pada tahun 2025 sebagai berikut

No.	Nama Sub Kegiatan
1	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3	Pelayanan Informasi Publik
4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

No.	Nama Sub Kegiatan
5	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
6	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
8	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
9	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi
10	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah
11	Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

d) Hasil Analisis Gender

Hasil analisis gender diwujudkan dalam bentuk dokumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB). Terdapat 11 sub kegiatan tahun 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah disusun GAP dan GAB. Data dukung sebagaimana link berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1LCPnTUAB0iCgEaQz2VasLLhoQHYdl_h_5?usp=sharing.

e) Alat Analisis Gender

Alat dan Teknik Analisis Gender yang digunakan adalah Model *Gender Analysis Pathway* (GAP). Komponen Utama Analisis Gender Model *Gender Analysis Pathway* (GAP) menggunakan 9 langkah, yaitu:

- Langkah ke-1 : Memilih kebijakan/ program/ kegiatan;
- Langkah ke-2 : Menyajikan data pembuka wawasan terpilah menurut jenis kelamin, baik kuantitatif maupun kualitatif;
- Langkah ke-3 : Mengenal Isu kesenjangan gender;
- Langkah ke-4 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (internal);
- Langkah ke-5 : Menemu kenali isu kesenjangan gender (eksternal);
- Langkah ke-6 : Merumuskan kembali tujuan kebijakan/ program/ kegiatan;
- Langkah ke-7 : Menyusun rencana aksi;
- Langkah ke-8 : Tetapkan baseline (data dasar);
- Langkah ke-9 : Indikator gender.

2. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan

akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan.

- a) Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.
- b) Regulasi/kebijakan tentang penganggaran PUG didasarkan pada pencapaian Visi Misi Kota Surabaya 2021-2026 yang selaras dengan
 - i. RPJMD Kota Surabaya 2021-2026;
 - ii. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026;
 - iii. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - iv. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Nomor: 400.2/491/436.7.13/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2024;
 - v. GAP dan GAB.

Anggaran Responsif Gender (GAP dan GAB) di Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Rp2.459.129.418
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp12.212.554.307
3	Pelayanan Informasi Publik	Rp1.180.247.014
4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp57.058.841.214
5	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.809.529.676
6	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.373.110.034
7	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Rp344.878.712
8	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp1.700.071.798
9	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	Rp851.773.959
10	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Rp5.093.782.846
11	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp421.848.609
	Total Anggaran	Rp87.505.767.587

3.2 Pelaksanaan

a. Output yang Mendukung Pemberdayaan Perempuan

No	Bidang	Kegiatan
1	Politik	Pelibatan perempuan dan kelompok perempuan pada Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">● Padat Karya Sabun Wani Wangi● Penyediaan aplikasi Padat Karya
3	Sosial	<ul style="list-style-type: none">● Peningkatan kemampuan TIK aparatur pemerintahan dan masyarakat● Penyediaan aplikasi Sayang Warga
4	Hukum	Sosialisasi PUG
5	Lainnya	<ul style="list-style-type: none">● Diseminsai informasi● Penanganan pengaduan masyarakat● Penyediaan layanan berbasis digital● Penyediaan infrastruktur TIK

Data dukung sebagaimana link berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1LPRyeh8u5W_KKHU3whrjP6VWPLJm_MS?usp=sharing

b. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Internal PD

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu dengan melaksanakan sosialisasi tentang materi pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, materi pengetahuan mengenai tanda-tanda kekerasan, serta cara melindungi diri dari tindakan kekerasan.

c. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender

Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, diantaranya dilakukan dengan:

- Peningkatan pengetahuan dan kemampuan khususnya dalam bidang TIK melalui program Broadband Learning Center,
- Peningkatan ketahanan ekonomi keluarga melalui program Padat Karya.

d. Data Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Internal PD

Sampai dengan Juni 2025, tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan di Dinas Komunikasi dan Informatika.

e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender

Ketersediaan sarana dan prasarana yang responsif gender diharapkan dapat mewujudkan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan bagi laki-laki dan perempuan, serta kelompok rentan seperti lansia, difabel dan anak-anak.

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Laktasi	1	Baik
2	Ram Jalan	1	Baik
3	Toilet Laki-Laki dan Perempuan	4	Baik
4	Toilet untuk Disabilitas atau Lansia	2	Baik

Data dukung sebagaimana link berikut
<https://drive.google.com/drive/folders/1J0WHuSvVgC1hdZnAcJpPJeKeRToim9qZ?usp=sharing>

f. Pembinaan PUG Perangkat Daerah

Pembinaan PUG perangkat daerah diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pada perencanaan: kegiatan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Dinas Komunikasi dan Informatika serta dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- Pelaksanaan kegiatan: pendampingan dalam penyusunan GAP dan GAB;
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan: Rapat evaluasi pelaksanaan PUG.

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG diatur pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender. Seluruh anggaran pembangunan termasuk Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kota Surabaya telah di monitoring dan evaluasi oleh Bappedalitbang Kota Surabaya dalam sebuah sistem bernama E-monev. Melalui sistem ini, seluruh program kegiatan dimonitoring, dievaluasi, serta dikontrol agar pembangunan dapat terlaksana sesuai target, dan memenuhi unsur inklusivitas serta keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya.

3.4 Pengawasan

Agar PUG dapat berjalan sesuai rencana maka perlu dilaksanakan pengawasan yang proporsional. Pemerintah Kota Surabaya melalui Inspektorat Kota Surabaya telah memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas

Penyelenggaraan PUG, yaitu berupa Surat keputusan Inspektur Kota Surabaya Nomor 411.44/1919/436.6/2020 Tentang Pedoman Pengawasan PPRG tertanggal 6 Oktober 2020. Pedoman ini memberi acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertugas melaksanakan pengawasan PUG.

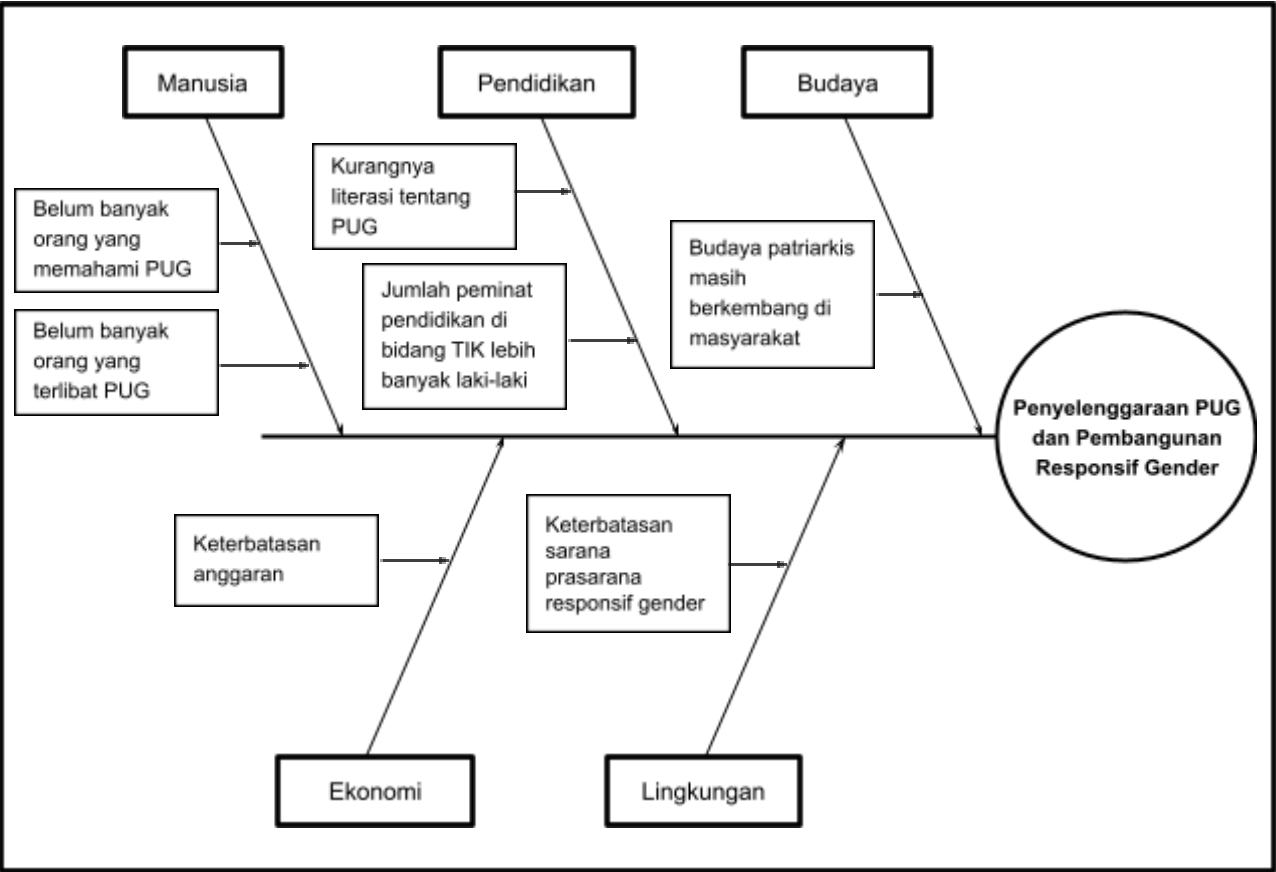
3.5 Pelaporan

Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pelaporan atas Penyelenggaraan PUG dalam bentuk Buku Panduan Penyelenggaraan PUG Kota Surabaya pada Bab V. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaporkan penyelenggaraan PUG melalui Laporan Kinerja PD (LKj), yaitu laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya, serta serta dokumen Profil Pengarusutamaan Gender Perangkat Daerah.

BAB IV

**TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH DALAM
PENYELENGGARAAN PUG DAN PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER
KOTA SURABAYA**

4.1 Analisa Tantangan atau Permasalahan



4.2 Kesimpulan

- a. Perlunya pemahaman pengarusutamaan gender oleh semua pegawai.
- b. Perlunya keterlibatan semua unsur Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pembangunan responsif gender.
- c. Perlunya informasi tentang pengarusutamaan gender yang dapat diakses oleh semua unsur Perangkat Daerah.
- d. Perlunya peningkatan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

a. Yang sudah dilaksanakan

- Sosialisasi Pengarusutamaan Gender kepada pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

- Penyediaan sarana prasarana responsif gender meliputi sarana prasarana kebersihan, fasilitas ibadah, dan fasilitas ibu menyusui.

b. Rekomendasi/Saran

Berdasarkan analisa tantangan dan permasalahan penyelenggaraan PUG, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan PUG dan perlu peningkatan yaitu strategi pengalokasian dan penggunaan anggaran secara efektif untuk program kegiatan responsif gender serta peningkatan penyediaan sarana prasarana responsif gender. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi tantangan adalah budaya patriarkis yang masih ada di masyarakat serta ketimpangan gender minat masyarakat yang bekerja di bidang TIK. Hal tersebut diperlukan peningkatan literasi PUG kepada masyarakat.

BAB V

**INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER
(GENDER EQUALITY, DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

5.1 Kegiatan dan Inovasi yang Telah Dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI) antara lain:

a. Aplikasi Sayang Warga

Aplikasi Sayang Warga merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk pendataan sosial dan kesehatan pada masyarakat untuk menghasilkan data yang akurat. Data yang dihimpun dan diolah pada aplikasi ini antara lain terkait kesehatan, stunting, kesehatan ibu dan anak, penyakit kronis, disabilitas, perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan, serta kemiskinan. Pendataan melalui aplikasi ini dilakukan oleh para Kader Surabaya Hebat yang berjumlah 28 ribu orang. Mereka adalah para perempuan warga Surabaya berusia 20 s.d. 60 tahun yang tersebar di masing-masing RT di seluruh kelurahan di Surabaya. Data yang dihimpun dari aplikasi ini menjadi bahan analisis Pemerintah Kota Surabaya untuk menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penentuan kebijakan, seperti intervensi untuk mengatasi permasalahan sosial.

b. Aplikasi Padat Karya

Aplikasi Padat Karya merupakan aplikasi perangkat lunak pendukung program Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang mempekerjakan masyarakat miskin. Penggunaan aplikasi ini membantu proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring serta evaluasi. Melalui aplikasi ini juga disediakan data masyarakat miskin, data bantuan pekerjaan, serta data aset Pemerintah Kota Surabaya yang dimanfaatkan untuk pemberian bantuan. Sehingga pemanfaatan aplikasi ini dapat mempermudah, mempercepat serta meningkatkan keakuratan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat miskin.

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan Profil Pengarusutamaan Gender Perangkat Daerah ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta responsivitas gender perangkat daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang responsif gender dan sosial inklusi serta lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Profil PUG Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh perangkat daerah dan jejaringnya serta masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya yang responsif gender dan sosial inklusi sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2025.

Lampiran

1. SK Pengarusutamaan Gender Dinas Komunikasi dan Informatika
<https://drive.google.com/drive/folders/1f2nY2EUhS2nmwqSAIO-clcWvTINMIm36?usp=sharing>
2. Dokumentasi Kegiatan Responsif Gender Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a. Kegiatan Peningkatan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
https://drive.google.com/drive/folders/1KAaD9DCCj7SKHqBvEDbEZ_ZYrSMtnMCb?usp=sharing
 - b. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
<https://drive.google.com/drive/folders/1mMcfR8DEKKMatl-CkOKJbJ0lOg4bHGSp?usp=sharing>
 - c. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
<https://drive.google.com/drive/folders/1fsdFMRHDP69Tp38j7WUUgrK6jebUIDE-?usp=sharing>
3. Bukti dukung inovasi penyelenggaraan PUG yang telah berdampak positif untuk masyarakat yg dihasilkan selama 1-2 tahun terakhir
<https://drive.google.com/drive/folders/1oZq4pIBThvIqAQIICQM5zUK7QxvH3sVB?usp=sharing>